

**PERAN QATAR DALAM MEMEDIASI KONFLIK AMERIKA SERIKAT
DAN TALIBAN 2013-2020**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

ROYYAN MUJAHID AL FARUQ

20323113

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**PERAN QATAR DALAM MEMEDIASI KONFLIK AMERIKA SERIKAT
DAN TALIBAN 2013-2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

ROYYAN MUJAHID AL FARUQ

20323113

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Peran Qatar dalam Memediasi Konflik Amerika Serikat dan Taliban 2013-2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

22 Agustus 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

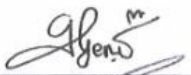


Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Gustrieni Putri, S.IP., M.A.
- 2 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 3 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.

Tanda Tangan





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 26 Agustus 2024



Royyan Mujahid Al Faruq

DAFTAR ISI

PERAN QATAR DALAM MEMEDIASI KONFLIK AMERIKA SERIKAT DAN TALIBAN 2013-2020	i
SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	14
1.8.1 Jenis Penelitian	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	14
1.8.4 Proses Penelitian	15
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB 2	16
KONFLIK AMERIKA SERIKAT DENGAN TALIBAN DAN KETERLIBATAN AKTOR-AKTOR : QATAR.....	16
2.1. Konflik Amerika Serikat dengan Taliban	16
2.1.1 Invasi Amerika tahun 2001	16
2.1.2 Dinamika Konflik	17
2.1.3 Dampak dan Respon Internasional	19
2.2. Aktor yang terlibat dalam upaya perdamaian di Afghanistan.....	21
2.2.1 Qatar	21
2.2.2 Pakistan.....	21
2.2.3 PBB	22
2.2.4 Rusia dan China	22
2.3. Hubungan Qatar dengan aktor yang berkonflik	23

2.3.1 Hubungan Qatar dengan Amerika Serikat.....	23
2.3.2 Hubungan Qatar dengan Taliban	24
2.4 Keterlibatan Qatar dalam Konflik	25
2.4.1 Awal mula keterlibatan Qatar	25
2.4.2 Upaya mediasi dan bantuan dari Qatar	27
2.4.3 Perjanjian Doha	28
BAB 3	31
UPAYA MEDIASI OLEH QATAR PADA KONFLIK AS - TALIBAN	
DILIHAT MELALUI SHUTTLE DIPLOMACY	31
3.1 Qatar : Mediator dalam Konflik Amerika Serikat dan Taliban	32
3.2 Shuttle Diplomacy oleh Qatar	35
BAB 4	40
PENUTUP	40
4.1. Kesimpulan	40
4.2 Rekomendasi.....	43
DAFTAR PUSTAKA	45

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya melihat bagaimana keterlibatan Qatar sebagai mediator dalam konflik Amerika Serikat dan Taliban yang sudah berlangsung beberapa dekade belakangan. Rumusan masalah tersebut kemudian dikupas menggunakan pendekatan *Two-Level Game* milik Putnam yang menjelaskan tentang bagaimana kebijakan di tingkat internasional sangat dipengaruhi oleh kepentingan di tingkat domestik. Setidaknya untuk penggambaran awal dari keterlibatan yang dimaksud, Qatar sudah sejak lama memulai karirnya sebagai mediator konflik di beberapa kasus negara-negara teluk. Sehingga konflik Amerika Serikat dan Taliban ini dilihat sebagai arena baru bagi Qatar untuk semakin menunjukkan eksistensi politik luar negerinya di mata internasional. Jika dilihat menggunakan pendekatan Putnam tadi, terdapat dua tingkat bagi negosiator Qatar untuk melangsungkan kebijakannya. Di tingkat internasional Qatar harus berhadapan dengan Amerika Serikat dan Taliban untuk merumuskan kesepakatan tentatif dan di tingkat domestik berhadapan dengan kepentingan nasional untuk meratifikasi atau tidaknya kesepakatan di tingkat internasional. Terdapat istilah winset dalam pendekatan ini, semakin besar winset yang dimiliki Qatar maka semakin besar peluang terjadinya ratifikasi.

Kata-kata kunci : Qatar, *Two-Level Game*, internasional, domestik, winset

ABSTRACT

This study attempts to see how Qatar is involved as a mediator in the United States and Taliban conflict that has been going on for decades. The formulation of the problem is then discussed using Putnam's *Two-Level Game* approach which explains how policies at the international level are greatly influenced by interests at the domestic level. At least for the initial depiction of the involvement in question, Qatar has long started its career as a conflict mediator in several Gulf countries. The conflict between the United States and the Taliban is seen as a new arena for Qatar to increasingly show the existence of its foreign policy in the international community. If viewed using Putnam's approach, there are two levels for Qatari negotiators to carry out their policies. At the international level, Qatar must face the United States and the Taliban to formulate a tentative agreement and at the domestic level face national interests to ratify or not the agreement at the international level before. There is a term winset in this approach, the greater the winset Qatar has, the greater the chance of ratification.

Keyword : Qatar, *Two-Level Game*, international, domestic, winset

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Doha Agreement merupakan perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Pasukan Taliban yang menduduki Afghanistan untuk segera mengakhiri peperangan. Perjanjian ini dilaksanakan di Doha, Qatar pada 29 Februari 2020 dengan Qatar sebagai tuan rumah sekaligus mediator dalam perjanjian tersebut. Isi dari kesepakatan yang dibuat antara lain penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO untuk meninggalkan Afghanistan, kesepakatan oleh Taliban untuk menghentikan gerakan Al-Qaeda di bawah wilayah kekuasaan Taliban dan ditutup dengan perbincangan antara pemerintah Afghanistan dan Taliban (Qazi & Barakat, 2020)

Dari segi politik, perjanjian Doha tidak menguntungkan bagi Afghanistan selaku negara tempat terjadinya konflik. Akan tetapi peluang tersebut dimanfaatkan oleh Taliban untuk memperoleh legitimasi yang lebih besar pasca perjanjian damai disepakati. Lebih lanjut dalam Perjanjian Doha tersebut Amerika Serikat sepakat atas penarikan pasukan dan koalisinya secara bertahap untuk meninggalkan Afghanistan. Menurut Saleh ketika realisasi perjanjian, Amerika Serikat dianggap tidak menepati janji untuk segera menarik pasukannya dari Afghanistan. Amerika Serikat mengeluarkan biaya yang cukup besar tetapi tidak berpengaruh atas pembangunan yang ada di Afghanistan, dana tersebut hanya digunakan untuk proyek perang (Talmullah et al., 2022).

Berikutnya Amerika Serikat juga sepakat untuk membantu pencegahan atas terjadinya terorisme yang terjadi di Afghanistan. Amerika Serikat yang selama ini

berusaha membersihkan Afganistan dari tindakan teror yang dilakukan oleh Taliban memahami perlunya membuka dialog dengan Taliban. Taliban turut diikutsertakan dalam perjanjian untuk menjaga keamanan di kawasan Afghanistan dan menyepakati gencatan senjata agar tidak menjadi konflik baru di kawasan tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga meminta kepada Taliban untuk tidak membuat rekrutmen bagi gerakan-gerakan teroris seperti Al-Qaeda dan ISIS agar tidak membahayakan banyak pihak (Talmullah et al., 2022).

Kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dinilai rasional dari sudut pandang Amerika Serikat. Meskipun begitu, dalam pelaksanaan realisasinya masih ditemukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari perjanjian yang telah disahkan. Dalam pidatonya pada tahun 2016, Biden mengatakan bahwa kepentingan Amerika Serikat di awal adalah keamanan masyarakat mereka di atas negara lain. Kemudian Amerika Serikat memilih untuk menarik pasukannya karena dorongan domestik negara mereka. Belum lagi ini merupakan invasi terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. (Suwari et al., 2021).

Maka dalam tulisannya mengemukakan beberapa pandangan yang disandarkan pada temuan-temuan dalam penelitiannya terkait penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Pertama, kondisi politik dalam negeri Amerika Serikat ketika itu menuntut perang tersebut dihentikan karena tidak lagi layak diperjuangkan. Hal ini disampaikan oleh salah seorang warga negara Amerika mengingat Amerika tidak lebih mengetahui terkait kebutuhan negara Afghanistan daripada Afghanistan itu sendiri. Kedua, pengeluaran perang Amerika Serikat yang terlalu banyak dan dianggap menimbulkan banyak kerugian. Sejak 18 tahun terakhir mereka telah mengeluarkan biaya untuk menginvasi Afghanistan mencapai

2 triliun USD. Selain kerugian biaya, perang di Afghanistan juga telah banyak memakan korban tentara Amerika Serikat sejumlah 2000 orang dan puluhan ribu warga sipil. Ketiga, Masta juga menyebutkan bahwa beberapa negara seperti China, Iran dan Rusia sudah membangun hubungan kearah yang lebih baik dengan Afghanistan dari pada berkuat pada perang dengan suatu motif politik tertentu. Seperti misalnya China yang sudah banyak memberikan bantuan perang kepada Afganistan selama konflik, begitu juga Rusia dan Iran (Masta, 2020).

Perang yang terjadi sejak diberlakukannya kebijakan *War On terror* oleh Amerika Serikat telah melalui dinamika yang sangat panjang. Bush harus mengeluarkan kebijakan tersebut akibat dorongan tragedi yang menimpa WTC tahun 2001 silam. Ketika itu Bush mengirimkan pasukan militer ke Pakistan dan Afghanistan sebagai negara yang disebut sebagai sarang terorisme. Pengiriman pasukan ini didukung oleh sekutunya Inggris dan juga Nato melalui operasi militer yang pertama pada bulan Oktober. Belum sampai disitu pada pertengahan tahun 2002 Amerika Serikat kembali mengirimkan 10.000 pasukannya untuk melaksanakan operasi yang berikutnya . Tahun-tahun berikutnya menjadi tahun yang cukup berat bagi keamanan di Afghanistan. Permulaan perang di Afghanistan yang cukup kompleks menjadikan keterlibatan Qatar dalam konflik sebagai bantuan untuk mendamaikan kedua pihak dirasa menjadi bagian yang penting dari peperangan antara Amerika Serikat dengan Taliban (Purba et al., 2022).

Kelompok Taliban yang menjadi rival Amerika Serikat di medan pertempuran sebetulnya sudah ada sejak 1990-an. Kelompok ini didirikan oleh Mohammad Omar semasa peperangan melawan Soviet satu dekade sebelum kelompok ini dibentuk. Istilah Taliban diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah Murid. Kelompok ini mulanya menaungi pelajar mahasiswa di tahun 1994 sebagai gerakan sosial di wilayah Kandahar yang menjadi kendaraan untuk merespon kekacauan akibat konflik dengan pasukan Soviet. Tujuan dari didirikannya Taliban ini untuk memulihkan kembali stabilitas dan ketertiba di Afghanistan. Memang tidak lama sejak dibentuknya kelompok ini, Taliban sudah berubah menjadi kelompok militer yang siap dengan medan pertempuran (Rashid 2001)

Tahun-tahun setelahnya Taliban mampu menguasai ibu kota Kabul. Pada 1996 pemerintahan Afghanistan berhasil diambil alih oleh Taliban, sistem pemerintahan konvensional Afghanistan dirubah menjadi sistem pemerintahan Islam menurut Taliban. Taliban juga terlibat dalam mendukung kelompok sejenis di level internasional yaitu Al Qaeda. Taliban menempatkan Afghanistan sebagai tempat perlindungan bagi kelompok Al Qaeda karena telah mampu memegang sistem negara Afghanistan. Setelah itu kelompok Taliban ini mengalami jatuh bangun akibat konflik dan invasi dari Amerika. Namun justru ini menjadi bagian dari sejarah panjang kelompok Taliban di Afghanistan (Rashid 2001)

Jika ditarik pada asal-usul keterlibatan Qatar dalam konflik di Afghanistan, pada tahun 2011 Taliban diundang oleh Qatar untuk membuka kantor politik di Doha, Qatar. Hal ini dilakukan tentunya atas seizin Barack Obama selaku presiden Amerika Serikat yang saat itu memiliki pengaruh kuat di Afghanistan (Jakarta Post,

2021). Kemudian berselang dua tahun kementerian luar negeri Afganistan mengumumkan pembukaan kedutaan besar Qatar di Kabul. Meskipun hingga kini belum sempat terealisasi, setidaknya hal ini menunjukkan hubungan baik antara Qatar dan pemerintah Afghanistan dan Taliban.

Posisi Qatar saat itu terbilang cukup tepat, Qatar dipandang oleh Amerika sebagai negara yang netral dan layak menjadi mediator untuk menengahi konflik Amerika Serikat dan Taliban. Kemudian dari sudut pandang Afghanistan, Qatar mengambil peran penting dengan menyediakan ruang politik bagi Taliban yang tidak biasa dilakukan oleh mereka (Cevy & Batubara, 2022). Sejak lama Taliban selalu menetapkan suatu keputusan di medan pertempuran, dan baru ketika Qatar terlibat dalam upaya perdamaian Taliban merasakan ruang negosiasi politik yang berlainan. Kedua pandangan inilah yang akhirnya membuat Qatar semakin dipandang sebagai pihak ketiga yang solutif bagi Amerika Serikat dan Taliban. Tidak hanya sampai batas mediasi, keduanya kemudian menandatangani perjanjian perdamaian dengan segala ketentuan.

Keberadaan Qatar berada disamping Afghanistan untuk terus mengawal konflik berujung pada perjanjian damai antara kedua pihak yang berkonflik. Hal ini dapat dicapai karena keseriusan Qatar dalam upaya perdamaian tersebut. Misalnya saja ketika Taliban sudah berkuasa penuh atas Afghanistan, diperkirakan 40% dari 110.000 pengungsi yang dievakuasi Amerika Serikat telah sampai di bandara Al-Udeid Qatar pada tahun 2021 sebelum akhirnya menuju negara tujuan. Di sisi yang lain Qatar juga turut mengevakuasi 3.000 orang dengan aman ke bandara untuk kemudian diungsikan ke tempat yang aman. Qatar juga berperan penting atas pembangunan rumah sakit yang layak bagi warga Afghanistan disana. Kemudian

dibangunkan juga tempat penampungan dan kamar mandi untuk distribusi makanan bagi korban konflik serta penyediaan pesawat khusus dari maskapai Qatar Airways untuk mengangkut pengungsi (Cevy & Batubara, 2022).

Dinamika yang terjadi di Afghanistan terkhusus keterlibatan Qatar dalam rekonsiliasi konflik cukuplah efektif bagi perdamaian kedua pihak. Tentunya Qatar memiliki maksud dan tujuan dari upaya yang dilakukannya terhadap Taliban dan Amerika Serikat. Jika berkaca pada konsep dasar politik, maka perlakuan Qatar sejak tahun 2013 hingga penandatanganan perdamaian di tahun 2020 sangatlah politis. Bersamaan dengan tindakan Qatar terhadap konflik setidaknya mengandung tiga dimensi politik yaitu nilai, kepentingan dan kekuasaan (Damayanti, 2009). Tiga hal ini yang kemudian menjadi landasan sebuah negara ketika berpolitik. Maka penelitian ini berfokus akan membahas dinamika tindakan Qatar terlibat dalam konflik berkepanjangan di Afghanistan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Qatar dalam Memediasi Konflik Amerika Serikat dan Taliban melalui *Shuttle Diplomacy* 2013 - 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Motif Qatar terlibat sekaligus menjadi mediator dalam konflik Amerika Serikat dan Taliban di Afghanistan. Jika dilihat posisi Qatar terhadap kedua negara yang sedang berkonflik, Qatar bisa saja memilih diam untuk tidak

ikut campur dalam urusan mereka. Akan tetapi Qatar memilih terlibat dan aktif menengahi keduanya.

2. Dinamika konflik yang terjadi selama peperangan berlangsung. Dalam hal ini dinamika yang menyebabkan perlunya ada pihak ketiga yang terlibat dalam konflik untuk mengakhiri peperangan.
3. Upaya apa saja yang ditempuh Qatar dalam memediasi konflik Amerika Serikat dan Taliban untuk mencapai perdamaian melalui meja perundingan. Lebih spesifik bagaimana Qatar memaksimalkan posisinya untuk menjadi mediator utama.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan membahas mengenai proses pengambilan kebijakan luar negeri Qatar dalam proses mediasi konflik yang terjadi di Afghanistan. Penulis melihat adanya keterlibatan Qatar pada konflik dimulai sejak dibukanya kantor politik Taliban di Doha, Qatar terhitung sejak tahun 2013. Maka dari itu penelitian ini akan mengkaji proses yang dilakukan Qatar sejak memutuskan untuk terlibat pada konflik di Afghanistan tahun 2013. Kemudian untuk membuat batasan akhir penelitian ini agar tidak melebar, penulis menentukan Doha Agreement pada tahun 2020 sebagai akhir dari ruang lingkup penelitian ini. Doha Agreement menjadi simbol kesepakatan perdamaian melalui penandatanganan perjanjian kedua belah pihak. Singkatnya kajian atas proses pengambilan kebijakan oleh Qatar di Afghanistan dihitung sejak tahun 2013 dan berakhir pada tahun 2020.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan merujuk pada literatur jurnal dan berita sebagai pengambilan isu dan konteks dalam studi kasus. Tentunya pemilihan jurnal dan berita disandarkan pada kriteria artikel yang berkualitas. Misalnya jurnal berjudul “Peran Qatar Sebagai Mediator Dalam Rekonsiliasi Konflik di Afghanistan pada Tahun 2013 - 2021” terbitan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Karya Abi Ichsan Cevy dan Amligo Batubara ini berisi tentang bagaimana Qatar melalui kebijakan luar negerinya menciptakan hubungan yang harmonis dengan Taliban. Dimulai dengan undangan Qatar kepada Taliban untuk mendirikan kantor politik di Doha, berlanjut bantuan-bantuan evakuasi pengungsi dari Afghanistan akibat konflik hingga Perjanjian Doha yang ditandatangani pada tahun 2020 (Chevy & Batubara, 2022).

Peran Qatar dalam tulisannya digambarkan sangatlah besar dan berpengaruh bagi perdamaian di Afghanistan. Qatar dikatakan sebagai negara yang netral sehingga mampu menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Qatar juga dijelaskan memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat sejak tahun 1972 dan Taliban sejak tahun 2013. Keterlibatan Qatar dalam konflik berujung pada mediasi kedua pihak dengan Qatar sebagai mediatornya. Selain itu Qatar juga memberikan empatinya kepada masyarakat Afghanistan dengan memberikan fasilitas-fasilitas kebutuhan bagi korban konflik seperti rumah sakit, tempat pengungsian dan bantuan evakuasi korban. Akan tetapi kelemahan dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan mengenai proses pengambilan kebijakan oleh Qatar selaku mediator utama. Kecenderungan penelitian ini adalah pada peran langsung keterlibatan Qatar pada konflik (Chevy & Batubara, 2022).

Terdapat juga penelitian terdahulu berjudul “Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Perjanjian Damai dengan Taliban Tahun 2020”. Karya Awani Yamora Masta ini memilih teori pengambilan keputusan sebagai kerangka berpikirnya. Penelitian tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi Amerika Serikat dalam menandatangani perjanjian perdamaian dengan Taliban dan menarik pasukannya dari Afghanistan. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwasanya terdapat tiga faktor utama Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan, diantaranya yaitu kondisi politik dalam negeri Amerika Serikat, ekonomi dan militer dan konteks internasional (Masta, 2022).

Lebih lanjut kondisi politik dalam negeri yang dimaksud diantaranya ialah tekanan dari masyarakat bahwasanya invasi terhadap Afghanistan tidak lagi layak diperjuangkan. Sedangkan untuk kondisi ekonomi dan militer, Amerika Serikat telah mengalami kerugian sebesar 2 triliun USD selama 18 tahun saja (Duffin, 2019). Kemudian dalam konteks internasional Masta menyebutkan tidak adanya kejelasan pemerintah Amerika dalam menginvasi Afghanistan, ambisi ini hanya didasarkan pada ketidaksukaan Amerika Serikat pada Taliban bukan geografis atau kepentingan politik lainnya. Keseluruhan penelitian tersebut secara subjektif berfokus pada kebijakan Amerika Serikat, maka konteks yang diangkat tertuju pada Amerika Serikat sepihak.

Berikutnya jurnal dengan judul “Realisasi Perjanjian Perdamaian *Doha Dialogue* antara Afghanistan-Amerika Serikat dan Taliban Periode Kepemimpinan Ashraf Ghani”. Ali Zhafir dkk. dalam jurnalnya itu menganalisis bagaimana implementasi perjanjian pasca ditandatanganinya Doha Agreement pada 2020 lalu

oleh Amerika Serikat dan Taliban. Dari penelitian tersebut disampaikan bahwasanya Taliban menjadi pihak yang paling diuntungkan dari hasil perjanjian tersebut. Posisi tawar Taliban selepas perjanjian damai tersebut semakin meningkat di mata Afghanistan. Belum lagi legitimasi bagi Taliban dari penarikan pasukan ini pun terus melambung tinggi dan jaringan operasi atas wilayahnya semakin meluas (Talmullah et al., 2022). Meskipun begitu, bukan berarti Amerika Serikat dirugikan oleh perjanjian tersebut, Amerika Serikat dapat menghemat pengeluaran akibat invasi dan terus melaksanakan perjanjian dengan baik.

Dari keseluruhan pustaka yang telah ditemukan, pembahasan lebih banyak berfokus pada peran suatu entitas politik maupun akibat dari adanya perjanjian Doha tersebut. Belum ditemukan penelitian yang menjelaskan mengenai proses-proses yang dilakukan Qatar ketika terlibat dalam konflik di Afghanistan, menggali informasi dari kedua pihak hingga merumuskan kebijakan luar negeri yang tidak hanya berdampak baik pada konflik akan tetapi juga menguntungkan Qatar. Oleh karena itu, peneliti menemukan celah yang belum diteliti oleh akademisi sebelumnya terkait bagaimana proses yang ditempuh Qatar dalam pengambilan kebijakan untuk memediasi kedua pihak

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran *Shuttle Diplomacy* yang dipelopori oleh Henry Kissinger. *Shuttle Diplomacy* atau diplomasi ulang-alik merupakan teknik mediasi yang digunakan untuk mempertemukan ide satu aktor dengan aktor lainnya dalam proses mediasi. Biasanya kerangka semacam ini digunakan ketika aktor-aktor yang melakukan mediasi sulit untuk bertemu dalam

ruang dan waktu yang sama. Maka muncul aktor ketiga yang melakukan pulang pergi antar aktor untuk secara bertahap mengupayakan kesepakatan antar aktor. Aktor ketiga ini berperan sebagai mediator dengan melakukan pertemuan secara terpisah antara aktor yang sedang dimediasi. Dalam hal ini mediator mengambil posisi yang sangat penting untuk mencapai kesepakatan (Hoffman, 2010).

Penerapan *Shuttle Diplomacy* pertama kali oleh Kissinger dilakukan ketika melakukan mediasi selama perang dingin pasca terjadinya perang Yom Kippur. Ketika itu Israel, Mesir dan Suriah sedang dalam ketegangan yang cukup tinggi sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Dengan kondisi seperti itu Kissinger melakukan perjalanan pulang pergi antara Tel Aviv, Kairo dan juga Damaskus untuk memfasilitasi pihak-pihak yang sedang berkonflik. Dari upaya tersebut Kissinger berhasil mendorong kesepakatan tiga negara untuk melakukan gencatan senjata di tahun 1973 (Hoffman, 2010).

Era kekinian *Shuttle Diplomacy* mengalami perkembangan pemikiran. David Hoffman dalam karyanya *Mediation and The Art of Shuttle Diplomacy* menguraikan teknik diplomasi ulang-alik dengan berbagai aspek yang mesti diperhatikan. Teknik-teknik ini melingkupi prinsip dasar dalam mediasi, strategi negosiasi dan juga langkah-langkah praktis dalam menempuh mediasi jenis ini. Hoffman menekankan inti dari *Shuttle Diplomacy* adalah peran mediator yang bukan hanya menjadi penghubung akan tetapi juga sebagai fasilitator yang aktif menguraikan permasalahan sehingga mendekatkan pada solusi. Lebih jauh lagi, mediator harus mampu memahami kepentingan, posisi dan kebutuhan pihak-pihak terkait (Hoffman, 2010).

Salah satu tantangan *Shuttle Diplomacy* ialah memastikan segala informasi yang akan disampaikan akurat sesuai dengan maksud yang ingin dicapai pihak tertentu. Dalam hal ini mediator harus mampu membangun kepercayaan yang utuh dengan pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu mediator juga harus mampu mengelola kondisi dan stabilitas untuk meminimalkan ketegangan antar pihak. Segala informasi yang ingin disampaikan melalui mediator harus terjaga netralitas dan kepercayaannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pihak terkait. Oleh karena itu keterampilan komunikasi yang baik dan penyesuaian strategis harus dimiliki oleh mediator (hoffman, 2010)

Hoffman menjelaskan dalam tulisannya terkait kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam menempuh *Shuttle Diplomacy*. Kerangka kerja yang dimaksud ialah persiapan dan perencanaan. Disini mediator perlu menempuh persiapan yang matang dengan melibatkan identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Mediator harus melakukan penelitian yang mendalam terkait kepentingan, posisi dan kebutuhan pihak-pihak terkait. Kemudian perencanaan disini termasuk didalamnya penetapan tujuan, menghimpun data dan pendekatan yang tepat untuk memulai langkah mediasi (Hoffman, 2010).

Kemudian yang kedua ialah membangun kepercayaan dan penjagaan netralitas mediator dimata pihak-pihak. Dalam hal ini konsistensi mediator sangatlah berpengaruh dalam proses mediasi hingga selesai. Ketiga ialah pengelolaan komunikasi dan informasi dalam *Shuttle Diplomacy*. Mediator harus mampu menyampaikan informasi berupa tawaran atau pesan dari pihak yang satu kepada pihak lainnya dengan akurat. Keempat ialah strategi dan fleksibilitas dalam proses mediasi. Bukan tidak mungkin dalam proses mediasi akan terjadi banyak

dinamika yang perlu ditangani secara cepat dan membutuhkan keputusan secepatnya. Dan kelima ialah implementasi kesepakatan setelah terjadinya kesepakatan. Langkah ini berfungsi untuk memastikan kesepakatan diimplementasikan secara benar dan mengantisipasi pelanggaran dalam salah satu pihak (Hoffman, 2010).

Dalam studi kasus konflik Amerika Serikat dan Taliban, Qatar menempati posisi sebagai mediator yang dipercaya oleh kedua pihak untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Penelitian ini akan melihat aktivitas yang dilakukan oleh Qatar menggunakan kacamata Hoffman melalui kerangka kerja tersebut. Nantinya penelitian ini akan melihat bagaimana persiapan Qatar dalam mendudukkan kedua pihak, membangun kepercayaan kepada pihak-pihak yang berkonflik, melakukan komunikasi yang efektif dengan Amerika Serikat dan Taliban, penyesuaian strategi sampai kepada penyelesaian masalah (Hoffman, 2010).

1.7 Argumen Sementara

Pembentukan kebijakan yang diambil oleh Qatar dalam keterlibatannya pada konflik Amerika Serikat dan Taliban ialah melalui negosiasi ulang-alik atau *Shuttle Diplomacy*. Dalam prosesnya Qatar perlu menempuh persiapan dengan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan identifikasi terkait kebutuhan masing-masing pihak. Setelah itu Qatar perlu secara bertahap menyesuaikan diri mendatangi masing-masing pihak untuk melakukan mediasi. Tidak menutup kemungkinan adanya forum bersama untuk mempertemukan pihak yang berkonflik. Qatar menempatkan dirinya sebagai mediator yang aktif bernegosiasi untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di

Afghanistan tersebut. Posisi Qatar saat itu sedang berusaha menjadi mediator independen dalam banyak kepentingan politik regional dunia arab sepertinya yang dijelaskan pada latar belakang, maka terlibat menjadi mediator dalam konflik Afghanistan menjadi hal yang tidak asing untuk ditempuh, dengan kata lain Qatar sudah cukup mampu untuk merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendudukkan pihak-pihak yang berkonflik.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sering digunakan para peneliti dalam kajian hubungan internasional. Rianto (dalam Cresswell, 2015, 23), mengungkapkan penelitian kualitatif menjelaskan mengenai fenomena dalam konteks yang dibahas dan memiliki kekuatan pada analisis deskripsi. Lebih lanjut Rianto (dalam Straus dan Corbin, 2009, 4) menyampaikan penelitian kualitatif temuan-temuannya tidak didapat melalui hitungan atau data statistik apapun (Rianto, 2020)

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemerintah Qatar , sedangkan objek yang menjadi fokus penelitian kali ini adalah kebijakan pemerintah Qatar yang terlibat dalam upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Taliban dalam *Doha Agreement* menggunakan kerangka pemikiran *Shuttle Diplomacy*.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menitik beratkan referensi pada sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang dimaksud disini adalah rujukan

berdasarkan jurnal ilmiah yang didapat dari media internet, artikel berita terpercaya yang telah terstandarisasi dan buku-buku rujukan. Selain itu untuk mengetahui kebijakan Qatar lebih jauh, portal berita Al-Jazeera milik Qatar menjadi sumber berita utama penelitian ini

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini melibatkan penulis selaku pihak pertama yang melakukan penelitian, kemudian hasil penelitian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing mata kuliah untuk dilakukan pengecekan dan revisi.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian yang membahas mengenai eksistensi Qatar dalam upaya perjanjian damai Amerika Serikat dan Taliban ini akan memuat 4 bab dalam penulisannya. Bab pertama berfokus pada latar belakang kebijakan yang diambil oleh pemerintah Qatar. Selain itu bab ini juga memuat prosedur penelitian yang menjadi kerangka penulisan penelitian ini, misalnya rumusan masalah dalam penelitian dan kerangka pemikiran yang menopang penelitian. Kemudian pada bab 2 akan membahas lebih detail terkait konteks yang dibicarakan pada penelitian ini, dalam hal ini keterlibatan Qatar dalam konflik di Afghanistan. Berikutnya bab 3 akan membahas mengenai proses mediasi yang dilakukan oleh Qatar dalam memediasi konflik Amerika Serikat dan Taliban. Terakhir, bab 4 berisikan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB 2

KONFLIK AMERIKA SERIKAT DENGAN TALIBAN DAN KETERLIBATAN AKTOR-AKTOR : QATAR

2.1. Konflik Amerika Serikat dengan Taliban

2.1.1 Invasi Amerika tahun 2001

Pada mulanya konflik Amerika Serikat dan Taliban ditengarai oleh kepentingan Amerika Serikat untuk memerangi kelompok teroris yang dituduhkan kepada Al Qaeda akibat serangan 11 September terhadap gedung kebanggaan Amerika Serikat *World Trade Centre* (WTC) pada 2001. Serangan tersebut memakan korban lebih dari 3000 orang dan menghancurkan 7 gedung World Trade Centre sekaligus dengan 2 diantaranya adalah gedung utama. Tak lama setelah itu George W. Bush membuat kebijakan Operation Enduring Freedom guna mengusut jaringan terorisme yang terlibat dalam serangan tersebut. Dalam prosesnya terdapat upaya diplomatik Amerika Serikat dengan negara-negara yang tertuduh memiliki hubungan dengan para teroris. Selain itu upaya represif dari Amerika Serikat dengan melakukan penyerangan kepada kelompok-kelompok teroris seperti Taliban dan Al Qaeda sudah dilancarkan (Saukani, 2023).

Ditahun yang sama ketika terjadi penyerangan World Trade Centre, Bush menandatangani undang-undang perlawanan terhadap terorisme. Dengan bantuan Inggris, Amerika mulai meluncurkan serangan bom terhadap Taliban (CFR, 2017). *Operation Enduring freedom* pada awalnya tidak secara spesifik dituduhkan kepada Taliban yang sedang berkuasa di Afghanistan kala itu. Hanya saja ketika Amerika Serikat hendak meminta pimpinan Al Qaeda yaitu Osama Bin Laden di ekstradisi kepada Amerika, Taliban menolak permintaan itu dan memilih untuk melindungi

Bin Laden yang saat itu sedang berada di Afghanistan (Saukani, 2023). Penolakan tersebut membuat Amerika menyerang Taliban dan terus memburu Bin Laden sejak Oktober 2001. Operasi terus dilakukan dengan bantuan PBB yang menghadirkan banyak koalisi semisal aliansi utara dan pasukan etnis Pashtun anti-Taliban.

Akhir tahun 2001 Amerika Serikat berhasil memukul mundur Taliban yang membuat kelompok ini terpecah. Seminggu kemudian benteng-benteng pertahanan milik Taliban runtuh karena serangan aliansi utara bentukan PBB. Meskipun begitu, Bin Laden masih belum juga tertangkap dan dikabarkan melarikan diri ke Pakistan. Setelah itu pada 5 Desember 2001 PBB melaksanakan konferensi di Bonn, Jerman yang dihadiri oleh Dewan Keamanan PBB. Dari konferensi tersebut diputuskan Perjanjian Bonn yang mengatur Hamid Karzai sebagai kepala pemerintahan sementara di Kabul, Afghanistan. Perjanjian Bonn juga melahirkan pembentukan pasukan keamanan *International Security Assistance (ISAF)* guna mengamankan wilayah Afghanistan dari keberadaan teroris. Sejak saat itu orientasi Amerika Serikat di Afghanistan tidak hanya sebatas memerangi Al Qaeda maupun Taliban, tapi juga membangun Afghanistan untuk mencegah setiap upaya terorisme disana (Saukani, 2023).

2.1.2 Dinamika Konflik

Gejolak konflik Amerika Serikat dengan Taliban sejak 2001 silam menjadi titik permulaan perang panjang di Afghanistan pada era baru abad 21 kini. Dalam 20 tahun berikutnya dinamika perang Afghanistan tersebut menyebabkan terbunuhnya ribuan korban militer Amerika Serikat maupun Taliban. Terus menerus operasi yang ditujukan untuk segera menemukan Bin Laden tidak berhenti dilakukan sehingga memicu perang di beberapa titik lokasi. Selain itu, anggaran

perang yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak juga tidaklah sedikit. Setidaknya kongres Amerika Serikat mengeluarkan USD 146 miliar untuk merekonstruksi bangunan disana dan menjadi sokongan pasukan keamanan yang bertugas (Thomas, 2023). Tentunya tidak mudah untuk menyingkirkan pasukan Taliban yang sudah lebih dulu menguasai Afghanistan sebelum kedatangan Amerika ke Afghanistan.

Pada periode awal berkecamuknya perang di Afghanistan, pasukan Amerika berhasil menggulingkan sel-sel milik Taliban dan Al Qaeda. Periode ini merupakan kemenangan telak Amerika Serikat atas kelompok Taliban dan Al Qaeda beberapa bulan pasca keruntuhan gedung WTC pada 11 September 2001. Akan tetapi kondisi ini tidak bertahan lama, tahun 2005 kelompok Taliban bersama dengan jaringan Haqqani dan kelompok ISIS melakukan upaya serangan balik dan mengancam keamanan Amerika Serikat di Afghanistan. Frekuensi serangan terus bertambah akibat koalisi Taliban, Haqqani dan ISIS. Hal ini disebabkan kelompok-kelompok tersebut sudah semakin berkembang secara struktural dan menjadikan Kabul yang berpenduduk 700.000 orang sebagai target pilihan serangan (Ghiasy, 2017).

Musim pertempuran terus berlanjut di kawasan Kabul. Pasukan-pasukan dari berbagai kelompok melancarkan serangan satu sama lain, terkhusus Amerika Serikat melawan kelompok aliansi Taliban. Tempat-tempat umum seperti rumah sakit, supermarket dan masjid menjadi sasaran penyerangan kelompok-kelompok yang berkonflik. Diperkirakan pada tahun 2016 sekitar 3,498 warga sipil tewas dan 7,920 lainnya mengalami luka-luka akibat konflik tersebut (Ghiasy, 2017). Dalam sebuah pemberitaan pada 31 Mei terjadi ledakan besar yang menewaskan 150 orang

dan menimbulkan 460 korban luka. Ledakan tersebut berasal dari bom bunuh diri di tengah konflik yang masih terus terjadi (Ghiasy, 2017)

2.1.3 Dampak dan Respon Internasional

Konflik Afghanistan memiliki dampak yang signifikan, baik secara lokal maupun skala global. Misalnya di dalam negeri sendiri, konflik ini telah menyebabkan penderitaan besar bagi penduduk Afghanistan. Ribuan warga sipil menjadi korban dari konflik yang berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti kelaparan dan kekurangan akses terhadap layanan kesehatan seperti rumah sakit dan lainnya. Tercatat lebih dari 2,000 warga sipil tewas dalam konflik yang terjadi pada 2020 silam akibat konflik langsung maupun kesulitan mendapatkan pengobatan (Al, 2023). Selain itu kerusakan infrastruktur lain seperti sekolah dan jalan-jalan, telah menghambat masyarakat untuk beraktivitas seperti pada umumnya.

Dalam skala global, konflik afghanistan berdampak pada permasalahan keamanan yang luas. Negara Afghanistan ini dianggap sebagai negara yang menjadi markas bagi kelompok teroris kelas internasional seperti Al Qaeda, sehingga keberadaan kelompok Taliban terlebih dalam konflik yang tengah terjadi memiliki dampak langsung terhadap keamanan global. Serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok-kelompok semacam ini dapat menimbulkan ancaman yang tidak hanya bagi negara-negara tetangga, tetapi juga bagi negara-negara di seluruh dunia. Berdasarkan laporan dari CNBC, kelompok teroris seperti Al Qaeda yang terlibat secara tidak langsung dengan konflik masih aktif di Afghanistan dan memberikan peringatan akan potensi ancaman terhadap keamanan global (Kermani, 2020).

Disisi lain konflik Afghanistan telah menciptakan krisis pengungsi bagi warganya sendiri. Tercatat jutaan warga Afghanistan telah menjadi pengungsi di dalam negeri maupun luar negeri. Mereka berupaya mencari perlindungan dari kekerasan dan ketidakstabilan. Para pengungsi bahkan kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal dan sumber penghidupan yang layak, hal ini juga meningkatkan resiko penyebaran penyakit di kalangan pengungsi. Menurut data yang dimiliki PBB, pada tahun 2020 saja lebih dari 270.000 warga Afghanistan menjadi pengungsi baru. Angka ini jika ditotal dengan seluruh pengungsi terdahulu telah menyentuh angka 2,6 juta jiwa (Asylum, 2024).

Dari segi ekonomi, konflik Afghanistan telah menghambat pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, tidak hanya bagi Afghanistan akan tetapi juga beberapa negara lain yang bersinggungan seperti Amerika. Menurut laporan Bank Dunia, terjadi kemerosotan dan kehilangan sekitar 5.9 Miliar Dolar AS dalam pendapatan ekspor dunia (Kell, 2022). Sedangkan dari segi kesehatan global, konflik ini meningkatkan jumlah korban jiwa dan kecacatan dalam jumlah besar. Kondisi yang terjadi telah mengganggu pelayanan kesehatan bagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pihaknya melaporkan bahwa konflik yang terjadi cukup memberikan ancaman bagi masyarakat terhadap akses layanan kesehatan.

Dampak konflik yang ditimbulkan terhadap stabilitas global tidaklah sedikit. Dari konflik tersebut perlu dilakukan upaya perdamaian guna pemulihan pasca terjadinya konflik. Negara-negara dan organisasi internasional seperti Uni Eropa menyatakan dukungannya terhadap proses perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan. Uni Eropa juga menegaskan bahwasanya perdamaian dan stabilitas keamanan di Afghanistan adalah tujuan utama mereka (Massrali, 2021). Lebih

lanjut perdana menteri Pakistan, Imran Khan ada di pihak Uni Eropa. Pada September 2021 ia menyatakan bahwa Afghanistan memerlukan solusi politik bukanlah militer untuk menuntaskan konflik dan membawa manfaat yang luas.

2.2. Aktor yang terlibat dalam upaya perdamaian di Afghanistan

2.2.1 Qatar

Qatar memainkan peran sebagai mediator atas konflik Amerika Serikat dan Taliban didorong oleh preferensi kebijakan luar negeri Qatar itu sendiri. Sudah sejak 5 tahun terakhir sebelum terlibat dalam konflik Amerika Serikat dan Taliban Qatar mengambil peran mediator dalam beberapa konflik, diantaranya Hamas dan Fatah, konflik durfur di Afrika Utara dan juga konflik Yaman antara kelompok Houthi dengan pemerintah Yaman. Keterlibatan Qatar atas konflik Amerika Serikat dan Taliban dapat dilihat dari bantuan air bersih, pembangunan infrastruktur sampai kepada pembukaan kantor diplomatik Taliban disana. Puncaknya ialah Qatar mampu mendudukkan kedua aktor yang berkonflik dalam meja perundingan dan mengantarkan sampai kepada penandatanganan perdamaian di tahun 2020 (Cevy & Batubara, 2022).

2.2.2 Pakistan

Pakistan menjagi bagian penting dalam proses perdamaian di Afghanistan dalam konflik Amerika Serikat dan Taliban. Pakistan memiliki hubungan historis yang cukup panjang dengan Taliban sejak era Soviet-Afghanistan di tahun 1980-an. Dalam konflik tersebut Pakistan terlibat sebagai bagian dari mediator ketika perbincangan terkait perdamaian di Doha Agreement pada 2020. Selain itu Pakistan

juga memberikan bantuan logistik dan pelatihan militer bagi pasukan Taliban jauh selama proses pendidikan militer Taliban. Pengaruh Pakistan terhadap Afghanistan maupun Taliban itu sendiri dirasa cukup kuat karena merupakan sahabat lama, maka tidak heran jika perjanjian damai dapat terlaksana (Fatah, 2021).

2.2.3 PBB

Selain aktor negara, Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa pun turut terlibat dalam upaya perdamaian atas konflik di Afghanistan. Sejak tahun 2001 ketika terjadi invasi Amerika Serikat, PBB sudah mulai memberikan bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat Afghanistan, membangun Afghanistan dan memberikan fasilitas politik yang terbuka. Pada 2002 kampanye perdamaian PBB melalui United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) sudah mulai digulirkan. Program yang dilaksanakan antara lain pemantauan pelaksanaan politik dalam negeri Afghanistan dan bantuan pelaksanaan kenegaraan di Afghanistan. Meskipun PBB bukan sebagai mediator yang aktif dalam konflik, ruang diskusi yang disediakan oleh PBB mampu menarik perhatian masyarakat dunia akan dorongan perdamaian di Afghanistan (Fuadi, 2014).

2.2.4 Rusia dan China

Pemerintah Rusia dan China seperti dengan Pakistan juga terlibat dalam upaya perdamaian atas konflik di Afghanistan. Upaya ini disebutkan terdorong karena urusan regional kedua negara tersebut. Secara letak geografis, Rusia dan China ini berdekatan dengan Afghanistan, maka membantu mengupayakan perdamaian menjadi salah satu pencegahan atas dampak yang ditimbulkan dari

konflik terhadap negara mereka. Rusia aktif mengadakan pertemuan trilateral dengan China dan Pakistan terkait urusan Afghanistan. Disisi lain China melakukan pendekatan ekonomi dengan Afghanistan, diantaranya memberikan bantuan ekonomi kepada Afghanistan dan mengadakan pertemuan untuk membahas rekonstruksi pasca konflik (Jozwiak & Rikard 2019).

2.3. Hubungan Qatar dengan aktor yang berkonflik

2.3.1 Hubungan Qatar dengan Amerika Serikat

Qatar dengan Amerika Serikat sudah membangun hubungan diplomatik sejak tahun 1980-an. Hubungan tersebut dibentuk atas keresahan kedua negara dalam bidang pertahanan. Pada tahun 1981, Qatar dan 5 negara teluk lainnya membentuk pasukan Gulf Cooperation Council (GCC) untuk membantu Irak dalam peperangan Irak-Iran 1980-1988. Pasukan GCC ini dibentuk sebagai koalisi kerjasama Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait dan Arab Saudi untuk urusan militer dan pertahanan di kawasan. Pasukan tersebut kemudian bergabung dengan koalisi militer Amerika Serikat di tahun 1991 untuk mengusir Irak dari Kuwait (Katzman, 2022).

Tepat di tahun berikutnya pada 23 juni 1992 Amerika Serikat dan Qatar menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan sebagai bentuk tindak lanjut hubungan bilateral. Perjanjian kerjasama antara kedua negara menyepakati pangkalan udara Al Udeid di Doha milik Qatar menjadi salah satu markas komando pusat Amerika Serikat untuk urusan militer di kawasan negara-negara teluk timur tengah. Dari kesepakatan tersebut juga lahir diantaranya *Operation Inherent Resolve (OIR)* dalam rangka menginvasi negara islam Iran, operasi keamanan di

kawasan dan juga menjadi pangkalan pesawat tempur canggih milik Amerika (Katzman,2022).

Selain dari segi militer dan pertahanan, Amerika Serikat dan Qatar juga terlibat dalam perjanjian perdagangan. Pada tahun 2004 Amerika Serikat dan Qatar menandatangani kesepakatan kerangka kerja perdagangan dan investasi (TIFA). Hal ini merupakan upaya investasi Qatar di negeri Paman Sam tersebut dalam beberapa sektor seperti real estate dan beberapa perusahaan. Disamping itu, Amerika Serikat juga mendirikan kantor-kantor cabang beberapa institusi pendidikan dan lainnya di Qatar, seperti Universitas Cornell, Universitas georgetown dan masih banyak lagi (Katzman, 2022).

Hubungan kedua negara Amerika Serikat dan Qatar terbilang cukup dekat. Amerika Serikat menempatkan Qatar sebagai mitranya di kawasan timur tengah dari sektor pertahanan dan ekonomi. Bahan-bahan mentah seperti minyak bumi dan gas alam banyak diimpor dari Qatar ke Amerika Serikat. Pun sebaliknya, Qatar mengimpor pesawat, mesin dan teknologi informasi dari Amerika Serikat untuk kebutuhan negaranya (Katzman, 2022). Seiring berjalannya waktu hingga masuk ke dekade ketiga sejak 1980-an bidang ekonomi kerjasama bilateral semakin kuat dan saling melengkapi kebutuhan satu sama lain.

2.3.2 Hubungan Qatar dengan Taliban

Taliban pertama kali mengumumkan akan membuka kantor diplomatik di Qatar pada Selasa, 18 Juni 2013. Kantor tersebut akan memfasilitasi perundingan perdamaian atas konflik yang terjadi di Afghanistan (Aljazeera, 2013). Pembukaan kantor diplomatik ini juga mendapatkan persetujuan presiden Amerika Serikat Barack Obama ketika perang di Afghanistan sedang berkecamuk. Akibat dari

pembukaan kantor ini, Qatar menjadi tuan rumah perbincangan upaya perdamaian konflik Amerika Serikat dan Taliban. Dari situ pula, pemerintah Qatar mendesak pembukaan kembali bandara Kabul untuk mengevakuasi warga Afghanistan yang terdampak konflik (JakartaPost, 2023).

Berbeda dengan kedekatan Qatar dan Amerika Serikat, hubungan antara Qatar dan Taliban baru dimulai sejak upaya keterlibatan Qatar dalam konflik Afghanistan. Belum ada hubungan diplomatik yang berkelanjutan antara Qatar dengan Taliban sebelum inisiasi keterlibatan Qatar dalam konflik Afghanistan. Pada tahun 2010 Qatar sempat menyelenggarakan forum politik bagi Amerika Serikat dan Taliban untuk membicarakan soal perdamaian. Hal ini menjadi warna baru bagi dinamika politik di Afghanistan yang terbiasa merumuskan kebijakan di medan pertempuran. Berselang tiga tahun kemudian, kedekatan antara Qatar semakin meningkat secara signifikan dan berbuah pembukaan kantor diplomatik Taliban di Doha, Qatar (*The Jakarta Post*, 2021).

2.4 Keterlibatan Qatar dalam Konflik

2.4.1 Awal mula keterlibatan Qatar

Rencana pembukaan kantor diplomatik Taliban di Qatar sudah menjadi perbincangan sejak Desember 2011. Informasi terkait rencana tersebut diterima oleh PM Qatar Hamid Karzai atas permintaan Amerika Serikat. Menurut mereka, kebutuhan mendirikan kantor diplomatik Taliban di Qatar guna menjadi penghubung dan mengadakan pembicaraan damai atas konflik yang terjadi di Afghanistan. Setelah mendengar kabar itu, pemerintah Afghanistan di Kabul memanggil duta besarnya yang bertugas di Qatar untuk mengkonsultasikan terkait

laporan tersebut. Pasalnya tidak sedikit masyarakat Afghanistan yang memandang perdamaian tidak akan terwujud jika kelompok Taliban masih terus eksis disana (Crews, 2011).

Keterlibatan Qatar dalam konflik ini ditengarai ketika Qatar mulai memainkan peran sebagai mediator dalam beberapa konflik yang terjadi. Tahun 2010 secara bertahap Qatar menjadi pusat diplomasi regional maupun global, memanfaatkan hubungan baiknya dengan berbagai negara untuk kemudian memfasilitasi perdamaian dalam konflik. Salah satu yang menjadi tonggak besar Qatar dipercaya menjadi mediator konflik ialah perang Afghanistan. Segala bentuk upaya politik dilakukannya untuk mencapai tujuannya tersebut. Terlebih di tahun 2013 misinya tercapai dengan pembukaan kantor diplomatik Taliban di Doha, Qatar (Aljazeera, 2013).

Pembukaan kantor diplomatik Taliban di Doha, Qatar diumumkan pada Selasa 18 Juni 2013. Informasi ini disampaikan oleh kantor berita Qatar setelah terjadi perundingan antara Qatar dengan Taliban dan Qatar dengan pemerintah Afghanistan. Pada Maret 2013 terjadi diskusi presiden Qatar dengan hamid Karzai, presiden Afghanistan. Dalam diskusi dihadiri juga oleh kalangan pejabat dan pebisnis dari Arab maupun Afghanistan. Tidak lupa juga menteri luar negeri dan ketua dewan tinggi perdamaian Zalmi Rassoul dan Salahuddin Rabbani turut kebersamai dalam diskusi (Aljazeera, 2013).

Tak lama berselang dari pembukaan kantor diplomatik Taliban di Doha, Qatar. Muncul berbagai macam respon masyarakat Afghanistan yang setuju maupun tidak sepakat dengan pembukaan kantor tersebut. Presiden Hamid Karzai awalnya menyambut baik atas upaya perdamaian tersebut, akan tetapi ia juga

menyampaikan kekhawatiran penyalahgunaan kantor tersebut untuk menyebarkan propaganda yang menyudutkan pemerintah Afghanistan. Selain itu tokoh-tokoh politik dan masyarakat Afghanistan mengecam pembukaan kantor tersebut. Mereka khawatir upaya tersebut memberikan legitimasi lebih kepada Taliban tanpa dibersamai komitmen dari Taliban untuk perdamaian yang berkelanjutan di Afghanistan (Aljazeera, 2013).

2.4.2 Upaya mediasi dan bantuan dari Qatar

Berbagai macam upaya dilakukan oleh Qatar untuk menunjukkan keseriusannya dalam memediasi konflik. Hal ini merupakan bagian dari strategi diplomasi luar negeri Qatar yang aktif dan proaktif. Selain pembukaan kantor diplomatik, Qatar juga memberikan dukungan lain berupa serangkaian pertemuan diplomatik dan konferensi internasional yang fokus membahas solusi perdamaian di Afghanistan. Misalnya di tahun 2012, Qatar menjadi tuan rumah perundingan Taliban dan Afghanistan yang dihadiri oleh perwakilan berbagai negara dan organisasi internasional (Purba, dkk, 2022). Selain itu Qatar juga membantu menyusun agenda perundingan, memfasilitasi komunikasi politik Amerika Serikat dan Taliban, serta menyediakan jaminan keamanan bagi peserta konferensi (Suwari, dkk, 2021).

Peran yang dilakukan oleh Qatar dalam proses perdamaianya tidak terbatas pada bantuan politik dan diplomasi. Dukungan materi dan logistik turut dilakukan oleh Qatar dalam komitmennya. Selain memobilisasi dukungan internasional terhadap perdamaian di Afghanistan, Qatar juga menyediakan bantuan fasilitas tempat tinggal bagi pejabat Taliban selama perundingan terjadi. Lebih jauh lagi dalam satu pemberitaan, Qatar juga menyediakan bantuan kemanusiaan bagi Warga

Afghanistan yang terdampak konflik (Cevy & Batubara, 2022). Bantuan seperti pangan, air bersih, perlengkapan tempat tinggal dan layanan dasar seperti pendidikan dan infrastruktur diupayakan semuanya oleh negara tersebut.

Kemudian setelah kekuasaan Afghanistan beralih sepenuhnya dibawah tangan Taliban, Qatar memainkan peran penting dalam evakuasi warga Afghanistan. Berdasarkan permintaan organisasi internasional, Qatar mengevakuasi 1.500 orang dan mengamankan perjalanan untuk 3.000 orang warga Afghanistan. Selain itu, sejumlah 110.000 pengungsi yang dievakuasi oleh Amerika Serikat melakukan transit di bandara Al-Udeid sebelum melakukan perjalanan berikutnya. Duta besar Qatar Sheikh Tamim bin hamad bersama timnya mengawal orang Amerika ke tempat yang aman melalui jalan-jalan di Kabul (Cevy & Batubara, 2022).

Tindakan Qatar tersebut sengaja dilakukan dalam rangka memenuhi komitmennya untuk membantu perdamaian atas konflik yang terjadi. Bantuan yang disiapkan oleh Qatar sejak pembukaan kantor diplomatik Taliban di Qatar memberikan gambaran keseriusan Qatar dalam menuntaskan konflik. Pembangunan rumah sakit, tempat penampungan, kamar kecil, distribusi makanan bagi puluhan ribu warga Afghanistan dan menyediakan maskapai pesawat untuk evakuasi warga dinilai sebagai langkah konkrit Qatar dari upaya perdamaian di Afghanistan (Cevy & Batubara, 2022).

2.4.3 Perjanjian Doha

Perjanjian Doha menjadi titik pertemuan besar yang mendudukkan ketiga aktor dalam konflik Afghanistan yaitu Amerika Serikat, Afghanistan dan Taliban (Talmullah, dkk, 2022). Posisi Qatar dalam perjanjian ini adalah sebagai tuan

rumah sekaligus mediator untuk menengahi konflik. Tidak hanya dihadiri oleh negara-negara yang berkonflik saja, Perjanjian Doha juga dihadiri oleh negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Pembahasan dalam forum mediasi yaitu berkaitan dengan upaya solutif untuk menyelesaikan konflik. Bukan saja karena dorongan warga negara yang berkonflik, akan tetapi juga negara-negara disekitar Afghanistan mendesak perlunya perdamaian karena merasa dirugikan akibat migrasi besar-besaran warga Afghanistan (Talmullah, dkk, 2022).

Perjanjian Doha disepakati oleh seluruh pihak sebagai langkah mengambil jalan terbaik dari konflik yang tengah berlangsung. Dalam Perjanjian Doha tersebut Afghanistan dikatakan sebagai negara yang sah dan diakui secara internasional, sedangkan Amerika Serikat disebut sebagai aktor yang berperan dalam stabilitas keamanan secara global (Talmullah, dkk, 2022). Kondisi ini kemudian dinilai oleh pasukan Taliban sebagai peluang untuk terus berupaya mengambil alih Taliban. Meskipun kondisi Afghanistan kian membaik, tetapi disisi lain justru tidak menguntungkan bagi Afghanistan dari segi politik karena menurunkan posisi tawar di hadapan pasukan Taliban (Talmullah, dkk, 2022).

Secara spesifik Perjanjian Doha menghasilkan 4 kesepakatan. Pertama, adanya jaminan dari Amerika Serikat atas afghanistan terkait penegakkan hukum bagi tanah Afghanistan terhadap individu atau kelompok manapun yang membahayakan bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Kedua, adanya jangka waktu yang jelas untuk penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Ketiga, adanya jaminan atas tanah Afghanistan untuk tidak lagi digunakan sebagai tempat melawan keamanan Amerika Serikat dan sekutunya. Keempat, gencatan senjata

permanen menjadi salah satu agenda dialog dan negosiasi di dalam Afghanistan (BBC, 2020).

Kemudian dalam kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan beberapa komitmen antara Amerika Serikat dan Afghanistan untuk bekerja sama menjauhkan tanah Afghanistan dari upaya pelatihan atau pembentukan kelompok teroris. Amerika Serikat juga menegaskan posisinya sebagai aktor yang siap membantu kemampuan keamanan pasukan Afghanistan dengan memberikan pelatihan guna mencegah ancaman dari kelompok-kelompok teroris internasional atau individu yang mengancam stabilitas keamanan di Afghanistan maupun terhadap Amerika Serikat. Selain itu Amerika Serikat juga akan terus melakukan operasi militer dengan pasukan Afghanistan untuk mengganggu pasukan Al Qaeda, ISIS-K atau kelompok teroris lainnya (BBC, 2020).

Pada bagian kedua kesepakatan tersebut kedua pihak berkomitmen untuk mengambil beberapa langkah sebagai upaya perdamaian. Amerika Serikat sepakat mengurangi jumlah pasukan menjadi 8.500 pasukan dan berkomitmen atas perjanjian AS-Taliban dalam waktu 135 hari sebelum nantinya ditarik seluruh pasukan. Kemudian Amerika Serikat akan membantu pendanaan untuk pemulihan keamanan di Afghanistan sekaligus dengan gencatan senjata permanen. Pada bagian ini ditutup dengan kesepakatan Republik Islam Afghanistan siap membangun hubungan diplomatik dengan anggota Dewan Keamanan untuk menghapus Taliban dari daftar sanksi (BBC, 2020).

BAB 3

UPAYA MEDIASI OLEH QATAR PADA KONFLIK AS - TALIBAN

DILIHAT MELALUI *SHUTTLE DIPLOMACY*

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai asal mula, dinamika dan variabel-variabel yang mungkin mendukung keterlibatan Qatar dalam konflik Amerika Serikat dengan Taliban. Data tersebut menggambarkan keseriusan Qatar untuk secara aktif terlibat dalam konflik dan mengupayakan perdamaian antara seluruh pihak. Mulai dari pembangunan kantor diplomatik Taliban di Qatar, memberikan bantuan kemanusiaan dan politik pada Taliban hingga memberikan ruang diskusi perdamaian di Qatar menjadi gambaran keseriusan Qatar menengahi konflik yang berkepanjangan tersebut (Cevy & Batubara, 2022).

Berikutnya pada bab ini akan dilakukan analisis terkait upaya yang dilakukan Qatar untuk terlibat langsung pada konflik yang terjadi menggunakan pendekatan *Shuttle Diplomacy* yang diadopsi dari karya David A. Hoffman *Mediation and the Art of Shuttle Diplomacy*. Pendekatan ini akan melihat bagaimana proses mediasi oleh Qatar terhadap pihak yang tengah berkonflik yakni Amerika Serikat dan Taliban menggunakan mediasi ulang-alik. Pendekatan ini memungkinkan melihat peran Qatar dalam upaya mediasinya melalui proses-proses yang ditempuh oleh Qatar sejak pertemuan dengan Taliban pada 2010 (Hoffman, 2010).

Dalam kerangka kerja Hoffman, keberhasilan mediasi terletak dari efektifitas mediator melakukan proses mediasi. Perlu dilakukan analisis bagaimana upaya Qatar menggali informasi terkait kepentingan, posisi dan kebutuhan Taliban untuk kemudian dibahas pada forum pertemuan dengan Amerika Serikat. Begitu

juga sebaliknya, apa yang menjadi penting dalam pertemuan Qatar dengan Amerika Serikat untuk kemudian menjadi informasi yang perlu disampaikan kepada Taliban. Efektifitas proses tersebut akan sangat membantu kedua pihak untuk segera menuju pada kesepakatan perdamaian (Hoffman, 2010).

3.1 Qatar : Mediator dalam Konflik Amerika Serikat dan Taliban

Sebelum masuk pada pembahasan bagaimana proses yang dilakukan oleh Qatar dalam memediasi konflik Amerika Serikat dan Taliban di Afghanistan, perlu dikupas terlebih dahulu posisi Qatar sebagai mediator dimata pihak yang berkonflik maupun branding Qatar itu sendiri. Menurut Hoffman selain mediator harus memiliki sifat netral yang tidak berpihak kepada salah satu aktor yang berkonflik, mediator juga harus cukup cakap dalam memainkan peran menggunakan strategi yang efektif bagi pihak yang berkonflik. Hal ini dimaksudkan agar proses mediasi berjalan tanpa merugikan salah satu pihak (Hoffman, 2010).

Jauh sebelum terlibat dalam konflik Amerika Serikat dengan Taliban, Qatar sudah mengambil langkah mediator dalam urusan politik luar negerinya. Dapat dilihat pada tahun 2006 menjadi kiprah pertama Qatar menjadi mediator dalam konflik Hamas dan Fatah (Kusumawijaya & Machmudi 2022). Berikutnya belum selesai dengan konflik Hamas dan Fatah pada 2007 Qatar sudah terlibat dalam konflik Yaman. Konflik ini mempertemukan kelompok Houthi di Yaman yang menuntut turunnya presiden Ali Abdullah dari pemerintahan Yaman. Berbagai upaya perdamaian diupayakan oleh Qatar, akan tetapi dalam prosesnya Qatar selalu mendapat kegagalan. Akhir dari konflik, Arab Saudi terlibat dalam konflik dan mampu mendudukan kelompok Houthi untuk mengikuti proses mediasi.

Keterlibatan Qatar dalam beberapa konflik lain seperti Konflik Darfur di wilayah Afrika Utara sejak 2008, konflik di Lebanon tahun 2008 dan konflik-konflik lainnya menunjukkan keseriusan arah politik luar negeri Qatar yang berkonsentrasi menjadi mediator tunggal di wilayah Teluk. Selain sebagai upaya menunjukkan citra positifnya di mata regional maupun global, kepentingan Qatar menjadi mediator konflik juga berguna untuk menggalang kerjasama yang lebih luas lagi. Terlihat dalam wawancara oleh Charlie Rose kepada mantan Perdana Menteri Qatar Jassim Al Thani di tahun 2014, ia mengungkapkan bahwa Qatar adalah negara besar berbeda dengan pandangan orang yang mengatakan Qatar adalah negara kecil. Persepsi elit politik Qatar inilah yang menunjukkan keberanian Qatar berhadapan dengan banyak konflik (Charlie Rose, 2014).

Preferensi Qatar dalam urusan politik internasional cenderung mengarahkan Qatar sebagai *middle power*. Dengan kiprah politik Qatar yang panjang sebagai mediator konflik di kawasan Timur Tengah sejak 2006, Qatar melihat keuntungan yang besar untuk mengambil peran tersebut. Preferensi disini memungkinkan melihat ketertarikan Qatar dalam urusan politik domestik maupun internasional yang dalam hal ini adalah menjadi kekuatan menengah di negara kawasan (Cevy & Batubara 2022). Kemudian kondisi politik dalam negeri Qatar yang cenderung stabil memungkinkan menjadi variabel lain untuk meyakinkan konstituen terkait posisi Qatar sebagai negara yang sanggup menjadi mediator konflik.

Kondisi politik internal Qatar hari itu dirasa cukup stabil jika dilihat dari keaktifan Qatar membantu negara-negara lain menyelesaikan konflik. Dibawah kepemimpinan Tamim bin Hamad Al Thani, Qatar mampu mencapai kiprah politik yang proaktif. Kemandirian ekonomi dengan mengandalkan ketersediaan energi

mampu mendorong Qatar menjadi negara yang kaya akan sumber daya minyak buminya. Maka tidak heran tantangan eksternal berupa blokade yang dilakukan Arab Saudi dan negara teluk lainnya tidak terlalu berpengaruh pada stabilitas ekonomi bagi Qatar, akan tetapi justru mendorong Qatar untuk meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara-negara yang jauh dari regionalnya (MacDonald, 2021).

Peran sebagai mediator konflik telah lama dirintis oleh Qatar sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Qatar, sehingga hal ini mampu menjadi daya tarik bagi Amerika Serikat dan Taliban terkait keterlibatannya pada konflik. Pada tahun 1981 Qatar bersama 5 negara teluk lainnya, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain dan Oman telah bersepakat untuk membangun kerjasama dibidang militer untuk membantu Irak dalam konflik Irak dengan Iran. Kerjasama ini membentuk koalisi pasukan Gulf Cooperation Council (GCC) yang kemudian aktif menjadi tim pertahanan bagi negara-negara di kawasan teluk (Cevy & Batubara 2022).

Peran Qatar dalam forum GCC tidaklah sedikit, kedekatan Qatar dengan anggota negara-negara teluk di masa-masa itu mungkin menjadi bahan pertimbangan kebijakan luar negeri Qatar (Katzman 2022). Misalnya meskipun hubungan Qatar dengan Bahrain cukup stabil, akan tetapi muncul kekhawatiran dari Bahrain tentang kedekatan Qatar dengan kelompok Islam di Mesir yakni Ikhwanul Muslimin (IM). Selain itu, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengemukakan hal serupa. Mereka tengah dalam keadaan berbeda pandangan politik dengan Qatar sehingga melahirkan ketegangan antara negara-negara tersebut dengan Qatar terutama terkait kedekatannya dengan kelompok IM tersebut.

Dari kondisi yang dijabarkan diatas, posisi Qatar sebagai negara kecil bukanlah posisi yang biasa saja. Kekuatan yang dimiliki Qatar dengan berbagai hubungan bilateral maupun multilateral memungkinkan Qatar untuk semakin dipandang sebagai negara yang layak menjadi mediator. Dalam forum Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Qatar aktif menyuarakan isu-isu perdamaian dan keamanan regional maupun global. Sedangkan dalam diskusi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Qatar adalah anggota yang aktif mendukung berbagai inisiasi terutama berkaitan dengan kerjasama di dunia islam dan menyelesaikan konflik regional (Niamey, 2022).

3.2 Shuttle Diplomacy oleh Qatar

Secara konsep, *Shuttle Diplomacy* menghendaki adanya persiapan dan perencanaan sebelum melangkah lebih jauh dalam proses mediasi. Sejak tahun 2010 Qatar mulai mengundang Taliban untuk melakukan pembicaraan terkait solusi perdamaian atas tanah Afghanistan. Qatar memainkan peran dengan melakukan pendekatan terhadap Taliban untuk membaca kebutuhan masyarakat Afghanistan atau lebih spesifik Taliban. Dalam proses ini Qatar dengan Taliban bersepakat untuk mendirikan kantor diplomatik Taliban di Doha tahun 2013 guna mendudukkan pihak agar bisa dilakukan mediasi (*The Jakarta Post*, 2021).

Dilihat dari sisi strategi negosiasi hubungan baik Qatar dengan kedua pihak yang berkonflik menjadi salah satu pintu untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan luar negeri sekaligus langkah taktis Qatar berikutnya. Jika diukur secara empiris kedekatan Qatar dengan pihak yang berkonflik cukup memberikan ruang segar bagi pengambil kebijakan luar negeri Qatar untuk melaksanakan mediasi

terhadap kedua pihak (Hoffman, 2010). Qatar telah membangun kedekatan dengan Amerika Serikat sejak tahun 1981. Tahun-tahun berikutnya hubungan Qatar dengan Amerika Serikat semakin mengalami kehangatan, pemerintah Qatar mengekspor pesawat dari Amerika sedangkan Amerika mengekspor minyak dari Qatar (Katzman, 2022).

Qatar sudah membangun hubungan dengan Amerika Serikat sejak tahun 1981. Hubungan ini dimulai dengan adanya kedekatan bilateral pada sektor keamanan dan militer. Qatar dengan Amerika Serikat menandatangani perjanjian kerja sama dan bersepakat atas bandar udara Al Udeid sebagai markas komando tentara militer Amerika Serikat disana. Selain itu Qatar juga melakukan investasi real estate dan perusahaan-perusahaan milik Qatar di negeri Paman Sam tersebut (Katzman, 2022). Kedekatan yang dimiliki oleh Qatar menyimpan rasa percaya bagi Amerika untuk memberikan ruang bagi Qatar agar dapat terlibat dalam konflik dan membantu upaya perdamaian.

Selain dari hubungan dengan Amerika Serikat, Qatar juga mengantongi hubungan baiknya dengan Taliban. Kali ini hubungan yang dibangun secara spesifik ditujukan pada upaya memberikan bantuan kepada konflik Amerika Serikat dan Taliban. Dari data yang didapat, pertemuan perdana antara Qatar dengan Taliban baru dimulai sejak 2010 dengan pembahasan perdamaian di tanah Afghanistan. Tentunya pertemuan ini dihadiri juga oleh Amerika Serikat selaku aktor yang berkonflik, dan diamini oleh Amerika Serikat dengan memberikan keleluasaan bagi Taliban untuk mendirikan kantor diplomatik di Qatar (Aljazeera, 2013).

Kita menemukan bahwasanya hubungan terhadap dua aktor yang berkonflik untuk menjadi mediator sudah terlihat. Akan tetapi Qatar perlu mengambil respon sebanyak-banyaknya sebelum pengambilan kebijakan ke depan nantinya. Seperti halnya informasi terkait kekhawatiran presiden Afghanistan Hamid Karzai terkait pembukaan kantor diplomatik ini. Beliau mengkhawatirkan pembukaan kantor diplomatik tersebut justru berpotensi menjadi alat untuk menyudutkan Afghanistan. Selain itu beberapa tokoh masyarakat Afghanistan mengecam pembukaan kantor diplomatik ini karena ditakutkan Taliban tidak memiliki komitmen apapun atas perdamaian dan tidak menjadi solusi yang tepat (Aljazeera, 2013)

Posisi Taliban yang telah selesai membuka kantor diplomatik di Doha atas persetujuan Amerika Serikat menunjukkan adanya kepercayaan kedua pihak untuk menitipkan solusi atas konflik berkepanjangannya itu kepada Qatar. Langkah berikutnya ialah tentang bagaimana Qatar mampu memaksimalkan dan menjaga kepercayaan Amerika Serikat dan Taliban itu menjadi sebuah langkah praktis menuju pada kesepakatan kedua pihak. Langkah yang ditempuh perlu dengan kehati-hatian yang cukup agar informasi yang tersalurkan dapat secara utuh sampai kepada pihak lawan. Dalam bukunya Hoffman menyebutkan istilah ini ialah membangun kepercayaan dan menjaga netralitas (Hoffman, 2010).

Proses komunikasi dan juga penyesuaian strategi seperti yang dikatakan Hoffman dalam studi kasus konflik Amerika Serikat dan Taliban ini bisa dilihat dari upaya yang dilakukan Qatar sejak 2013. Dalam era-era tahun itu sampai lima tahun setelahnya Qatar masih secara konsisten mengupayakan mediasi terhadap Amerika Serikat dan Taliban. Pada 2012 misalnya, Qatar mengadakan konferensi internasional dengan pembahasan khusus solusi perdamaian di tanah Afghanistan.

Konferensinya ini tidak hanya dihadiri oleh 3 aktor, akan tetapi juga turut dihadiri oleh perwakilan berbagai negara dan organisasi internasional (Purba, dkk, 2022).

Dalam proses mediasi ini juga, Qatar mengadakan perjalanan ke Washington dan perwakilan Taliban di Doha untuk memastikan hubungan tetap terjaga dan masih terus bisa melakukan mediasi. Hal ini juga yang dilakukan oleh Kissinger dalam misi perdamaianya menggunakan pendekatan diplomasi ulang-alik (Hoffman, 2010). Pendekatan secara soft dengan memberikan bantuan kemanusiaan diluar pertemuan politik dengan elit Taliban juga turut mewarnai langkah mediasi Qatar. Qatar membantu menyusun agenda perundingan, kemudian membantu memfasilitasi komunikasi kedua pihak sampai kepada menjamin urusan keamanan para perwakilan kedua pihak yang sedang melaksanakan konferensi (Suwari, dkk, 2021).

Proses mediasi yang panjang dilalui Qatar secara bertahap, Qatar juga melibatkan banyak pihak termasuk negara-negara kawasan untuk menggalang dukungan akan perdamaian di Afghanistan. Dukungan perdamaian diterima oleh pihak yang sedang berkonflik bukan saja dari negara-negara seeperti China dan Rusia, akan tetapi juga turut disuarakan oleh masyarakat Amerika Serikat itu sendiri. Pada tahun 2018 setelah melalui mediasi yang panjang, kedua pihak dibantu oleh Qatar secara serius akan membicarakan perdamaian dalam waktu dekat. Amerika Serikat dan Taliban menyepakati pembicaraan kerangka perdamaian yang kemudian terbit pada 2020 (Purba, dkk, 2022).

Pada tahun 2020 tepatnya 29 Februari Amerika Serikat dan Taliban melakukan penandatanganan kesepakatan yang telah disepakati. Isi perjanjian tersebut antara lain adanya jaminan dari Amerika Serikat atas Afghanistan tentang

penegakkan hukum di wilayah Afghanistan, jangka waktu penarikan pasukan Amerika Serikat dari tanah Afghanistan secara bertahap, jaminan oleh Taliban atas tanah Afghanistan untuk tidak digunakan melawan Amerika Serikat dan gencatan senjata (Purba, dkk, 2022).

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Doha Agreement merupakan hasil perjalanan panjang mediasi konflik Amerika Serikat dan Taliban yang berlangsung cukup lama setidaknya sejak tahun 2010. Mediasi konflik ini ditengahi oleh Qatar selaku negara mediator yang menawarkan diri untuk menjadi penengah yang netral bagi kedua pihak. Doha Agreement ini juga menjadi pencapaian tertinggi dari stabilitas politik Afghanistan dua dekade belakangan. Sehingga dengan lahirnya kesepakatan damai antara Taliban sebagai kelompok separatis di Afghanistan dengan pemerintah Amerika Serikat memunculkan udara baru untuk memulai politik Afghanistan yang tidak terkungkung dalam politik pertempuran perang (Talmullah et al. 2022).

Konflik ini bermula dari sikap Taliban untuk menolak permintaan Amerika Serikat agar pemimpin Al Qaeda yang kala itu berbasis di Afghanistan diekstradisi ke Amerika Serikat. Sejak saat itu pemerintah Amerika Serikat membuat satuan operasi seperti Aliansi Utara dan Etnis Pashtun anti-Taliban untuk secara paksa memburu Bin Laden dan membawanya ke Amerika Serikat. Pasukan bentukan Amerika ini mampu memukul mundur pasukan Taliban, akan tetapi Bin Laden masih belum ditemukan. Sejak saat itu operasi Amerika Serikat semakin membesar, bukan hanya memburu Bin Laden akan tetapi juga memerangi jaringan yang tertuduh sebagai terorisme global yang masih bercokol di Afghanistan (Talmullah et al. 2022).

Melihat kondisi yang semakin memburuk di Afghanistan, kedua pihak Taliban dan Amerika Serikat sama sekali tidak mau mengalah satu sama lain. Qatar yang sedang membangun kultur politik luar negeri sebagai mediator tergerak untuk terlibat dan menengahi konflik yang tengah terjadi. Jika kembali pada sejarah perpolitikan Qatar, Qatar sudah memiliki hubungan baik dengan pemerintah Amerika Serikat sejak 1980-an. Kondisi ini menjadi dorongan bagi Qatar untuk percaya diri terlibat sebagai penengah bagi kedua pihak. Berbeda dengan Amerika, Qatar belum memiliki hubungan yang dekat dengan Taliban maupun Afghanistan. Akan tetapi hal ini justru dilihat Qatar sebagai peluang politik untuk membuka relasi lebih jauh lagi (Saukuni 2023).

Setelah mendapatkan restu dari kedua pihak yang berkonflik, Qatar memulai memainkan perannya sebagai mediator seperti yang bisa dilakukannya beberapa tahun belakangan. Qatar mempersilakan Taliban untuk membuka kantor diplomatik di Doha untuk menyediakan ruang politik yang lebih tenang ketimbang medan pertempuran. Hal ini ditanggapi baik oleh Taliban, pada 2013 kantor diplomatik Taliban di Doha resmi dibuka dengan persetujuan pemerintah Amerika Serikat. Berikutnya Qatar beberapa kali mengundang Amerika dan Taliban untuk didiskusikan terkait upaya perdamaian atas konflik yang terus berlarut. Memang bukan hal yang mudah untuk menuntaskan konflik, tercatat baru pada tahun 2018 draft perdamaian diatas kertas mulai disusun untuk kemudian direalisasikan pada tahun 2020 (Cevy and Batubara 2022).

Selama proses mediasi damai oleh Qatar, Afganistan sebagai negara yang menjadi tempat terjadinya konflik mengalami kerusakan yang cukup parah. Pemerintah Qatar tidak hanya mendamaikan Amerika Serikat dan Taliban, akan

tetapi juga memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan di Afghanistan. Bantuan pangan dan air bersih diberikan oleh Qatar bagi warga Afghanistan selama proses mediasi konflik. Selain itu sarana prasarana seperti tempat tinggal, layanan pendidikan dan infrastruktur lain diupayakan oleh Qatar. Lebih jauh lagi, pasca perjanjian Qatar mengabuli komitmennya untuk mengevakuasi 1.500 orang dan mengamankan perjalanan bagi 3.000 orang warga Afganistan (Cevy and Batubara 2022).

Pada penelitian ini, penulis berusaha merumuskan sebuah pertanyaan singkat tentang bagaimana Qatar berperan sebagai mediator konflik Amerika Serikat dengan Taliban. Kemudian dilain sisi penulis akan mengambil kerangka pemikiran milik David A. Hoffman tentang *Shuttle Diplomacy* yang berbicara tentang diplomasi bagaimana aktor yang menjadi mediator perlu melakukan perjalanan ulang-alik untuk mendudukkan pihak yang berkonflik ataupun sekedar menyampaikan informasi. Pada kerangka pemikiran ini juga, Hoffman menguraikan adanya kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis studi kasus tersebut (Hoffman, 2010).

Argumen sementara pada penelitian ini negosiator Qatar melakukan mediasi dengan mendatangi secara langsung maupun tidak langsung Taliban dan juga Amerika Serikat dalam proses mediasinya. Qatar perlu menempuh mediasi satu persatu Amerika Serikat dan juga Taliban untuk melakukan perundingan. Hal ini juga dilakukan oleh menteri luar negeri Amerika Serikat ketika era perang dingin Henry Kissinger ketika melakukan diplomasi ulang alik terhadap negara negara yang berkonflik kala itu di timur tengah. Kissinger sampai perlu mendatangi

Tel Aviv dan juga Damaskus agar perdamaian kala itu dapat tercapai (Hoffman, 2010).

Dari argumen sementara tersebut dapat dilihat pada konteks ini sejak awal terlibat dalam konflik Amerika Serikat dan Taliban Qatar telah melakukan lobi terhadap kedua pihak untuk menyediakan ruang politik bagi Taliban di Doha. Kemudian bagaimana Qatar melakukan konferensi untuk mendudukkan pihak-pihak yang tengah berkonflik agar mau melakukan perundingan damai. Disisi lain juga Qatar memberikan bantuan berupa bantuan kemanusiaan seperti air bersih, infrastruktur dan bantuan keamanan. Segala aktivitas yang dilakukan oleh Qatar tersebut sedang mengupayakan perdamaian secara bertahap, dengan begitu kepercayaan pihak-pihak yang berkonflik terhadap Qatar semakin terjaga dan puncaknya 2020 kedua pihak sepakat untuk melakukan perdamaian (Talmullah, dkk, 2022).

4.2 Rekomendasi

Tidak ada satu tulisan pun yang ditulis dengan sempurna. Secara sadar penulis meyakini banyak sekali kekurangan dari tulisan ini yang mungkin dijumpai. Sejak awal penulisan, terdapat bagian-bagian data yang mungkin saja sudah tidak relevan untuk dibaca pada saat ini. Penulis hanya memaksimalkan pada apa yang bisa diupayakan. Termasuk ruang lingkup pembahasan yang spesifik sehingga menjadi keterbatasan pada penulisan ini. Penulis mengambil kacamata Qatar untuk melihat Doha Agreement melalui Diplomasi Ulang-alik. Akan sangat mungkin menggunakan kerangka yang sama tetapi dilihat dari sisi yang berlainan, misalnya

Amerika Serikat atau Taliban. Semoga penulis berikutnya mampu menyempurnakan pembahasan menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku :

- Boas, Morten, and Desmond McNeill. 2003. *Multilateral Institutions: A Critical Introduction*. N.p.: Pluto Press.
- Hoffman, David A. 2011. "Mediation and Mediation and the Art of Shuttle Diplomacy." *Negotiation Journal* 27, no. 3 (July): 263-309. https://www.researchgate.net/publication/227720884_Mediation_and_the_Art_of_Shuttle_Diplomacy#:~:text=Shuttle%20diplomacy%20is%20the%20practice,are%20few%20incidents%20of%20execution.

Rujukan Jurnal :

- Waziri, Ghayor. 2013. "Afghan Taliban Opened Its First Office Abroad in Qatar." KBR, 08 02, 2013. https://kbr.id/berita/cerita/_afghan_taliban_opened_its_first_office_abroad_in_qatar.
- Amini, Ma'ruf, and Devina Arifani. 2021. "THE TALIBAN & AFGHANISTAN: CONFLICT & PEACE IN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE." *International Journal of Law Recontruction* 5, no. 2 (09): 306-316.
- Anugrah, Boy, and Jabinson Purba. n.d. "KONDISI POLITIK DAN KEAMANAN AFGHANISTAN DI BAWAH REZIM TALIBAN DAN SIGNIFIKANSINYA TERHADAP GEOPOLITIK GLOBAL." *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 9 (3): 13-34.
- Azria, Kaiva, and Erna Ramayana. 2022. "SEJARAH PERANG AFGHANISTAN DARI DULU HINGGA KINI." *Jurnal PIR* 6, no. 2 (02): 122-137.
- Bjola, Corneliu, and Ilan Manor. 31. *Revisiting Putnam's two-level game theory in the digital age: domestic digital diplomacy and the Iran nuclear deal*. Juni ed. Vol. 2018. 1, 3-32: Cambride Riview of International Affairs. Cambride Riview of International Affairs.
- Cevy, Abi I., and Amligo Batubara. 2022. "PERAN QATAR SEBAGAI MEDIATOR DALAM REKONSILIASI KONFLIK DI AFGHANISTAN PADA TAHUN 2013 - 2021." *Kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (Mei): 9-16. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/download/12820/7042>.
- Charlie Rose. 2014. "Former prime minister of Qatar Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani reflects on his time in the administration and why he left government." Featuring Sheikh Hamad B. Jassim Al-Thani. Aired 05 13, 2014.
- Concenciao-heldt, Eugenia d., and Patrick A. Mello. 2017. "Two-Level Games in Foreign Policy Analysis." *Oxford University Press*, (Juli), 1-33. https://www.researchgate.net/publication/315698803_Two-Level_Games_in_Foreign_Policy_Analysis.
- Damayanti, Christy. 2009. "DIMENSI KEKUASAAN DALAM EKONOMI." *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 9, no. 1 (April): 96-100. <https://media.neliti.com/media/publications/23436-ID-dimensi-kekuasaan-dalam-ekonomi.pdf>.
- Fuadi, Ahmad. 2014. "PERAN UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN AFGHANISTAN (UNAMA) DALAM MEMBERIKAN

- PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI AFGHANISTAN PADA TAHUN 2009-2012.” *Jom Fisip* 1, no. 2 (10): 1-16
- Ismail, Achmad. 2021. “Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Sengketa Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act: Analisis Two-Level Game Theory.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 11 (1): 63-88. <https://www.neliti.com/publications/432538/kebijakan-luar-negeri-indonesia-dalam-sengketa-family-smoking-prevention-and-tob>.
- Katzman, Kenneth. 2022. “Qatar: Pemerintahan, Keamanan, dan Kebijakan AS.” *Congressional Reserch Service*, (04).
- Korhonen, Veera. 2024. “Total U.S. war spending in Afghanistan FY 2022.” Statista. <https://www.statista.com/statistics/1075910/total-us-war-spending-afghanistan-category/>.
- Kusumawijaya, Kresna, and Yon Machmudi. 2022. “Qatar Foreign Policy in Middle East Conflict Mediation.” *Journal Middle East and Islamic Studies* 9, no. 2 (12): 1-15. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&context=meis>.
- Lisowski, Michael. 2002. “Playing the Two-level Game: Us President Bush's Decision to Repudiate the Kyoto Protocol.” *Environmental Politics* 11, no. 4 (11): 101-119. 10.1080/714000641.
- MacDonald, Alex. 2021. “Qatar blockade: What caused it and why is it coming to an end?” Middle East Eye. <https://www.middleeasteye.net/news/qatar-blockade-saudi-arabia-lift-cause-end>.
- Maizland, Lindsay. 199. “Timeline: The U.S. War in Afghanistan.” Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/timeline/us-war-afghanistan>.
- Makatila, Siti F., and Gonda Yumitro. 2023. “Pengaruh Ideologi Taliban terhadap Dinamika Konflik Afghanistan.” *SANG PENCERAH Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9, no. 3 (10): 802-812.
- Masta, Awani Y. 2022. “Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Perjanjian Damai dengan Taliban Tahun 2020.” *Society* 10, no. 2 (11): 198-21. 10.33019/society.v10i2.422.
- Misra, Amalendu. 2002. “The Taliban, radical Islam and Afghanistan.” *Third World Quarterly*, 23 (3): 577-589.
- Patrick A, Mello, and Eugenia. 2017. “Two-Level Games in Foreign Policy Analysis,.” *Oxford Research Encyclopedia of Politics*,.
- Purba, Safna P., Reeni Windiani, and Satwika Paramasatya. 2022. “Kebijakan Amerika Serikat Menyetujui Perjanjian Perdamaian dengan Taliban dan Penarikan Pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan di Masa Kepemimpinan Donald Trump.” *Journal of International Relations*, 8 (3): 346-356.
- Niamey. 2022. “Qatar Participates in 47th Session of Council of Foreign Ministers of OIC.” Ministry Of Foreign Affairs. <https://mofa.gov.qa/en/qatar/latest-articles/latest-news/details/1442/04/14/qatar-participates-in-47th-session-of-council-of-foreign-ministers-of-oic>.
- Qazi, Shereena, and Sultan Barakat. 2020. “Afghanistan's Taliban, US sign agreement aimed at ending war.” *Al Jazeera*, February 29, 2020. <https://www.aljazeera.com/news/2020/2/29/afghanistans-taliban-us-sign-agreement-aimed-at-ending-war>.

- Qazi, Shereena, and Sultan Barakat. 2020. "Afghanistan's Taliban, US sign agreement aimed at ending war." *Al Jazeera*, February 29, 2020. <https://www.aljazeera.com/news/2020/2/29/afghanistans-taliban-us-sign-agreement-aimed-at-ending-war>.
- Rianto, Puji. 2020. *MODUL METODE PENELITIAN KUALITATIF*. 6: Penerbit Komunikasi UII. https://www.researchgate.net/profile/Puji-Rianto/publication/343064279_MODUL_METODE_PENELITIAN_KUALITATIF/links/5f1545b292851c1eff2180d1/MODUL-METODE-PENELITIAN-KUALITATIF.pdf.
- Robert O, Keohane, and Nye Joseph S. 1978. "Power and Interdependence: World Politics in Transition." *Political Science Quarterly* 93 (1): 132-134.
- Saukuni, Muhammad I. 2023. "PERANG AFGANISTAN ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN TALIBAN TAHUN 2021: ANALISIS TRINITAS PERANG CLAUSEWITZ." *Indonesia Journal of International Relations* 7, no. 2 (08): 241-270. 10.32787/ijir.v7i2.450.
- Servent, Ariadna R. 2014. "The role of the European Parliament in international negotiations after Lisbon." *Journal of European Public Policy* 21 (4): 568-586.
- Sugara, Robi. 2021. "UPAYA DAN KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PROSES PERDAMAIAN DI AFGHANISTAN MELALUI BINA-DAMAI." *Mukadimah* 5, no. 1 (02): 27-38.
- Suherli, Ian r., Siah Khosiyah, Iu Rusliana, and Pandu Pribadi. 2022. "POTENSI QATAR SEBAGAI PUSAT PERADABAN EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH DUNIA DI ERA KONTEMPORER." *Adz Dzahab* 7 (1): 65-84.
- Suwari, Ni Wawan A., Sukma Sushanti, and Ayu I. Pratiwi. 2021. "RASIONALITAS AMERIKA SERIKAT DALAM PERJANJIAN DAMAI DENGAN TALIBAN PASCA KONFLIK DI AFGHANISTAN." *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana*, (Juni). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/74006>.
- Talmullah, Ali Z., Mansur, Dairatul Ma'arif, and Asep K. Nasir. 2022. "Realisasi Perjanjian Perdamaian Doha Dialogue Antara Afghanistan-Amerika Serikat dan Taliban Periode Kepemimpinan Ashraf Ghani." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional : Lino* 2, no. 2 (Oktober): 94-104. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/lino/article/download/1571/1034>.
- Thomas, Clayton. 2021. "Taliban Government in Afghanistan: Background and Issues for Congress." *Congressional Reserach Service*, (11).
- Thomas, Clayton. 2023. "Afghanistan: Background and U.S. Policy." *Congressional Research Service*, (06).

Rujukan Berita :

- Knell, Yolande. 2018. "Setahun diboikot oleh negara-negara Teluk, Qatar 'tidak juga tumbang.'" BBC, June 5, 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44372341>.
- Knell, Yolande. 2022. "Afghanistan: Ekonomi ambruk, keluarga miskin makin kesulitan untuk bertahan hidup - 'Pinjam uang sana-sini untuk beli obat.'" BBC, April 26, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61175507>.

- Crews, Robert D. 2011. "Karzai accepts Taliban office in Qatar | News." Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2011/12/28/karzai-accepts-taliban-office-in-qatar>.
- Welle, Deutsche. 2021. "Mengapa Qatar Menjaga Hubungan Dekat dengan Taliban?" detikNews, September 1, 2021. <https://news.detik.com/dw/d-5705890/mengapa-qatar-menjaga-hubungan-dekat-dengan-taliban>.
- Fatah, Hamed A. 2021. "Pakistan: Shoring Up Afghanistan's Peace Process." Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/pakistan/b169-pakistan-shoring-afghanistans-peace-process>.
- Ghiasy, Richard. 2017. "The Afghan people: Observing nearly 40 years of violent conflict." SIPRI, October 5, 2017. <https://www.sipri.org/commentary/blog/2017/afghan-people-observing-nearly-40-years-violent-conflict>.
- CFR. 2017. "Hippocratic Oath for Bonn." Council Foreign Relations. <https://www.cfr.org/blog/hippocratic-oath-bonn>.
- AI. 2023. "Human rights in Afghanistan Amnesty International." Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/afghanistan/report-afghanistan/>.
- Lauras, Didier. 2021. "Afghan crisis cements Qatari global influence - World." The Jakarta Post, September 5, 2021. <https://www.thejakartapost.com/news/2021/09/05/afghan-crisis-cements-qatari-global-influence-.html>.
- Jozwiak, Rikard, and Abubakar Siddique. 2019. "U.S., Russia, China Call For 'Inclusive Afghan-Led' Peace Process." Radio Free Europe. <https://www.rferl.org/a/us-russia-china-call-for-inclusive-afghan-peace-process/29906452.html>.
- james, William, and Elizabeth Piper. 2018. "PM May agrees compromise deal with pro-EU MPs on Brexit legislation - source." Reuters, 06 14, 2018. <https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-qatar/qatar-provides-taliban-office-and-support-but-denies-giving-extremists-money-idUSKBN1JA24Z/>.
- Kermani, Secunder. 2020. "Al-Qaeda still 'heavily embedded' within Taliban in Afghanistan, UN official warns." BBC. <https://www.bbc.com/news/world-asia-54711452>.
- Lloyd, Austin. 2022. "Message to the Force - One Year Since the Conclusion of the Afghanistan War." Department of Defense. <https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3144082/message-to-the-force-one-year-since-the-conclusion-of-the-afghanistan-war/>.
- Massrali, Nabila, and Peter Stano. 2021. "Ouzbékistan: réunion du sous-comité sur la justice, les affaires intérieures, les droits de l'homme et les questions connexes." European Union : External Action. https://www.eeas.europa.eu/eeas/ouzb%C3%A9kistan-r%C3%A9union-du-sous-comit%C3%A9-sur-la-justice-les-affaires-int%C3%A9rieures-les-droits-de_fr.
- Asylum. 2024. "Situation Afghanistan situation." UNHCR Data Portal. <https://data.unhcr.org/en/situations/afghanistan>.
- Zucchino, David. 2021. "What Happened in the Afghanistan War?" The New York Times. <https://www.nytimes.com/article/afghanistan-war-us.html>.